



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)**

TA. 2021

BERDASARKAN APBD PERGESERAN II

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. JEND. SUDIRMAN NO.18 TELEPON (0532) 21195

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah merupakan unsur pelaksana teknis di daerah dan berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kotawaringin Barat salah satu perangkat daerah dari 38 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki luas wilayah 10.759 Km2, dengan jumlah penduduk sebanyak 269.629 jiwa, terbagi dalam 6 (enam) kecamatan serta 81 Desa dan 13 Kelurahan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal sebanyak 8 (delapan) buah instansi yaitu Kodim 1014 Pangkalan Bun, Polres Kotawaringin Barat, Lanud Iskandar Pangkalan Bun, dan Sub Denpom, Kejaksaan Negeri, BIN, BAIS, dan Imigrasi Pangkalan Bun.

Perubahan status Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perubahan nomenklatur sebagai pengganti Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat serta Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 yaitu Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan ditetapkannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai perangkat daerah maka berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 sebagai kerangka acuan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu Kepala Daerah terpilih berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah khususnya pada Tahun 2021.

BAB II

VISI DAN MISI

Visi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017-2022 adalah ***"Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas"***

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan Kabupaten Kotawaringin Barat :

1. Maju pembangunan sesuai **IPTEK** dan **INFRASTRUKTUR** yang representative.
2. Masyarakat yang bermoral punya **KETAKWAAN** pada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Keberagaman masyarakat yang **HARMONIS**.
4. Interaksi dan pergaulan yang **LANGGENG**.
5. Keberadaan hidup yang **AMAN**.
6. Kehidupan masyarakat **SEJHTERA**, cukup pangan, sandang dan papan.

Adapun Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017-2022 terdiri dari 6 (enam) poin sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut maka dapat dirumuskan rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ada 2 (dua) strategi antara lain :

1. Dari perspektif masyarakat/layanan :

Strategi : Mengoptimalkan stakeholder yang ada sebagai upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

2. Dari Perspektif kelembagaan :

Strategi : Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif guna menciptakan pelayanan kesbangpol yang unggul.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM TERPILIH

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat yang terpilih maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

A. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019–2022 yang telah disusun adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air.
2. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.
3. Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan *Tujuan* diatas adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.
3. Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
5. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah.
6. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

C. Program

Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 1 tahun kedepan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan pembinaan karakter bangsa di kalangan masyarakat. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa dengan sub kegiatan berikut :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan peran serta masyarakat, pemilih pemula dan para peserta pemilu (partai politik). Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan berikut :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

3. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dari Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi memberikan pemahaman dan pembinaan kepada organisasi dan lembaga kemasyarakatan untuk peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan berikut :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta pencegahan terjadinya konflik sosial. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan berikut :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

BAB IV

KEBUTUHAN DATA KINERJA

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 yang merupakan rencana tahunan SKPD disusun berdasarkan pada beberapa sumber-sumber data dari dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan pedoman awal dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK). Adapun sumber-sumber data tersebut antara lain:

1. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019–2022.
2. Cascading Renstra Badan Kesbangpol Hasil Review Tahun 2019–2022.
3. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021.
4. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2021.

BAB V

RENCANA KINERJA

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.
3. Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
5. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah.
6. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Dari beberapa sasaran strategis diatas dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator kinerja yang merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut :

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 ,

1. Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA.
2. Prosentase fasilitasi pembinaan pendidikan politik didaerah Presentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif.
4. Prosentase penanganan konflik social.
5. Nilai SAKIP perangkat daerah.
6. Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah.

Adapun untuk target dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021, *Tabel Perubahan RKT dan PK Terlampir* .

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KTW. BARAT

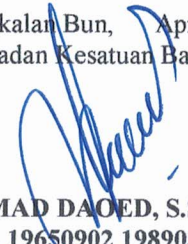
No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	72 Kategori Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	73.458.950
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	73.458.950
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	36.253.600
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	19 Dokumen	37.205.350
					Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan			100%	3.506.542.797
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	515 Dokumen	3.506.542.797
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	14 Dokumen	3.462.836.597
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	500 Dokumen	41.350.850
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	2.355.350
II	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	118.801.314
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	2 Jenis	13.530.000
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	5 Stel	3.000.000
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti	1 Orang/kali	10.530.000

III	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	0 kasus	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina			29,05%	464.333.300
						Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan pemuda-pemudi/pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) serta kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa Perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	300 Orang	464.333.300
						Sub Kegiatan: Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama	- Orang	337.753.000
						Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	300 Orang	126.580.300
IV	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	100%	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan serta Budaya Politik	Persentase pemahaman politik masyarakat			20,52%	1.322.904.850
						Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat dan peserta pelatihan penyusunan LPJ bantuan keuangan partai politik	50 Orang	1.322.904.850
						Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat	50 Orang	22.584.850

						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Parpol	- Orang	0
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dari Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan/Hibah Kepada Partai Politik	1 Kegiatan	1.300.320.000
V	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina			58%	15.137.200
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	- Orang	15.137.200
						Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	- Orang	0
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Movev Ormas dan LSM	3 Laporan	15.137.200

VI	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	0%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas			8 Instansi	250.161.850
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	51 Kegiatan	250.161.850
						Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD)	15 Laporan	13.891.950
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Tim Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	3 Kegiatan	24.520.600
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	48 kegiatan	211.749.300
TOTAL PAGU KESELURUHAN									5.965.164.738

Pangkalan Bun, April 2021
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik


MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si
NIP. 19650902 198903 1 013

VI	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	0%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas			8 Instansi	250.161.850
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	51 Kegiatan	250.161.850
						Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD)	15 Laporan	13.891.950
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Tim Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	3 Kegiatan	24.520.600
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	48 kegiatan	211.749.300
						TOTAL PAGU KESELURUHAN			5.965.164.738

Pangkalan Bun, Mei 2021
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik

MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si
NIP. 19650902198903 1 013

BAB V

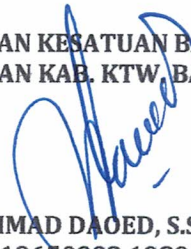
RENCANA KINERJA

Demikian Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebagai wujud atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja sebagai alat pendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, dapat mewujudkan target kinerja yang bertanggung jawab dan terarah guna menunjang pembangunan daerah.

Pangkalan Bun, April 2021

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAN KAB. KTW. BARAT**



**MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si
NIP. 19650902 198903 1 013**

BAB V

RENCANA KINERJA

Demikian Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebagai wujud atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ssebagai alat pendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, dapat mewujudkan target kinerja yang bertanggung jawab dan terarah guna menunjang pembangunan daerah.

Pangkalan Bun, Mei 2021

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAN KAB. KTW. BARAT**


MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si
NIP. 19650902 198903 1 013